

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Perang Dunia ke-II Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global. Kekuatan Amerika Serikat semakin terlihat ketika pasca Perang Dingin sekitar tahun 1990an yang ditandai dengan runtuhnya kekuatan komunis Uni Soviet dan muncul negara-negara baru yang menganut sistem demokrasi di Eropa Timur. Peristiwa ini dikatakan sebagai fase awal dari periode gelombang demokratisasi ketiga. Fase ini dimulai sekitar tahun 1974 hingga tahun 1990an, yang mana pada saat itu terjadi transisi rezim-rezim non-demokrasi menuju rezim demokrasi secara signifikan mulai dari Eropa Timur, Eropa Selatan, Asia, dan Amerika Latin. Tercatat bahwa pada tahun 1990 negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi meningkat mencapai 45,4 persen dan hingga saat ini gelombang demokratisasi tersebut terus berlangsung (Huntington, 2000, hal. 147).

Sebagai sebuah kawasan yang memiliki nilai strategis dalam politik dunia, kawasan Timur Tengah hingga Afrika Utara pun tidak luput dari sasaran gelombang demokratisasi. Puncaknya terjadi pada tahun 2011 yang dikenal dengan peristiwa *Arab Spring* yang merupakan awal dari revolusi menuju demokratisasi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Peristiwa tersebut ditandai dengan adanya pemberontakan sebagai aksi protes rakyat terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa dan otoriter di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Sahide, 2017, hal. 136-140). Berawal dari Tunisia, *Arab Spring* kemudian menimbulkan efek domino secara cepat dan

masif menjalar ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya, seperti Mesir yang ditandai dengan penggulingan pemerintahan Hosni Mubarak, dan selanjutnya menuju ke Libya yang berhasil mengakhiri era kediktatoran pemerintahan Muammar Qadhafi yang telah berkuasa selama 42 tahun.

Revolusi yang terjadi di Libya sedikit berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya karena memiliki intensitas pergolakan yang lebih tinggi. Gejolak revolusi yang terjadi di Libya membangkitkan gerakan *people power* yang sangat besar. Rakyat menuntut untuk memperoleh kebebasan, demokrasi dan kesejahteraan kepada rezim pemerintahan yang berkuasa. Tuntutan tersebut merupakan bentuk dari sikap ketidakpuasaan rakyat Libya terhadap pemerintahan Muammar Qadhafi yang otoriter dan dinilai tidak mempresentasikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya (Yon Machmudi, 2016, hal. 154-159). Akan tetapi, tuntutan masyarakat Libya tersebut tidak sesuai harapan dapat berjalan dan tercapai dengan cepat seperti negara-negara lain yang telah lebih dahulu mencapai revolusi, yaitu Tunisia dan Mesir. Hal inilah yang kemudian membuat konflik yang terjadi selama proses revolusi di Libya menjadi wacana internasional yang krusial dan dianggap sebagai konflik yang harus memerlukan bantuan dari luar Libya, karena dalam konflik tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yaitu warga sipil banyak menjadi korban penyerangan dan kekerasan oleh pemerintahannya sendiri (Lopez, 2015).

Pada akhirnya, bulan Februari tahun 2011, salah seorang Duta Besar Afrika untuk PBB yang bernama Abdurrahman Mohammed Shalgam menyatakan bahwa Libya membutuhkan bantuan Internasional untuk keluar dari kediktatoran Qadhafi. (Purwoko, 2011) Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi Qadhafi karena baru kali ini ada yang berani menentangnya secara terbuka dan terang-terangan apalagi di dalam forum dunia Internasional. Setelah pernyataan tersebut, PBB menegaskan bahwasanya konflik Libya telah melanggar batas kemanusiaan sehingga perlu diberlakukan intervensi kemanusiaan dan masyarakat internasional perlu terlibat membantu menyelesaikan masalah di krisis kemanusiaan dan politik di Libya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian PBB langsung mengadakan sidang dan menghasilkan Resolusi PBB Nomor 1970 dan 1973 mengenai situasi yang terjadi di Libya (Joy, 2011, hal. 3). Keluarnya resolusi PBB tersebut kemudian memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris untuk membombardir Libya. Hal ini mengakibatkan keterlibatan Amerika Serikat di Libya menghentikan krisis pemerintahan yang terjadi semakin besar.

Dengan dalih mengusung prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM, Amerika Serikat sebagai polisi dunia merasa memiliki kewajiban untuk menghentikan dan membebaskan penduduk Libya dari kekejaman rezim Qadhafi. Hal ini dipertegas melalui pidato Presiden Barack Obama yang menyatakan:

“To brush aside America’s responsibility as a leader and more profoundly our responsibilities to our fellow human beings under such circumstances would have been a betrayal of who we are. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different. And as President, I refused to wait for the images of slaughter and mass graves before taking action” (Obama, 2011).

Pernyataan Presiden Barack Obama tersebut mempertegas bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki posisi kuat bertanggungjawab untuk menentukan orientasi keamanan dunia. Oleh karena itu, tugas yang harus dilakukan Amerika Serikat adalah melindungi warga dunia terbebas dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti yang terjadi di Libya. Sebagai kawasan yang memiliki daya tarik tersendiri, konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara tidak jarang mengundang keterlibatan peran asing, salah satunya adalah Amerika Serikat. Sejak dekade tahun 1990an, Amerika Serikat sering terlibat dan berperan dalam persoalan politik maupun ekonomi di kawasan Timur Tengah (Sihbudi, 1998, hal. 1).

Dalam upayanya menjatuhkan rezim Qadhafi dan mewujudkan demokrasi beberapa strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Libya kemudian dilakukan, baik dalam bidang militer, ekonomi dan kemanusiaan. Salah satu strategi kebijakannya adalah bergabung dengan NATO dan tentara oposisi pemerintahan Libya yang dikenal dengan *National Transitional Council* (NTC). Amerika Serikat juga memberikan berbagai bantuan terhadap pihak oposisi pemerintah untuk menyerang kelompok Qadhafi. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2011 rezim pemerintahan Qadhafi runtuh (Azikiwe, 2011). Runtuhnya pemerintahan Muammar Qadhafi pada tahun 2011 merupakan sejarah baru bagi Libya untuk memulai perjalanan baru menuju negara yang lebih demokratis setelah 42 tahun mengalami

pemerintahan yang sangat dikatator. Transisi pemerintahan Libya ini mendapatkan sorotan dan dukungan dari dunia internasional.

Masa depan Libya, bagaimana negara ini kemudian dibentuk akan menjadi kajian yang sangat penting bagi politik regional yang tentunya akan memengaruhi posisi Libya di percaturan internasional. Keterlibatan Amerika Serikat melalui NATO yang ditugaskan oleh PBB nampaknya memberikan pengaruh dalam membawa perubahan bagi rakyat Libya menuju negara demokratis. Amerika Serikat memiliki peran dalam membantu *recovery* pemerintahan menuju pemerintahan yang demokratis pasca revolusi melalui NTC sebagai otoritas pemerintahan sementara yang diakui di Libya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam keterlibatannya terhadap proses demokratisasi di Libya. Maka, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama dalam mewujudkan demokrasi di Libya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Amerika Serikat dalam mewujudkan demokrasi di Libya. Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Realisme Demokratik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh peranan Amerika Serikat dalam proses demokratisasi di Libya, dan melihat

kepentingan nasional Amerika Serikat di balik kebijakan politik luar negerinya di Libya.

1.4. Signifikansi

Sebagai sebuah negara yang memiliki pengaruh besar, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat selalu menjadi perhatian publik. Terlebih kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat akan selalu mengalami perubahan seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan. Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat mengalami banyak perubahan dan membawa harapan besar bagi masyarakat internasional untuk terbentuknya tatanan dunia yang lebih baik. Setelah pada masa pemerintahan Presiden Bush, Amerika Serikat selalu berhadapan dengan hubungan yang konfliktual khususnya di negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehingga pada masa pemerintahannya, Presiden Barack Obama kemudian berupaya untuk mengubah status Amerika yang dipandang agresif dengan memulai kembali hubungan diplomatik dan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat *smart power* termasuk terhadap Libya (Joseph S. Nye, 2012, hal. 106).

Fenomena *Arab Spring* tahun 2011 yang menyebabkan konflik selama proses revolusi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, khususnya Libya telah menjadi isu perbincangan geopolitik dunia yang menarik perhatian masyarakat internasional. Gejolak *Arab Spring* tersebut merupakan salah satu tantangan signifikan bagi pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, sehingga kawasan tersebut dijadikan sebagai bagian dari prioritas agenda kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa

pemerintahan Presiden Barack Obama. Terlebih bagi Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan besar, sebagai polisi dunia yang dianggap memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Selain itu, Amerika Serikat memang sudah sejak dulu terlibat dalam berbagai konflik dan dinilai sebagai satu-satunya kekuatan adidaya yang sangat berpengaruh dan memiliki dominasi kuat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Sihbudi, 1998, hal. 1).

Oleh karena itu, penelitian pada skripsi ini menjadi kajian penting untuk menganalisis keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik revolusi di Libya. Amerika Serikat yang bekerjasama dengan NATO dan kelompok oposisi yang menentang pemerintahan Qadhafi yaitu *National Transitional Council* (NTC) dalam membantu penggulingan Muammar Qadhafi telah menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai bantuan seperti bantuan militer maupun finansial digelontorkan oleh Amerika Serikat kepada pihak oposisi pemerintah untuk menyerang kelompok Qadhafi hingga akhirnya pada bulan Agustus 2011 rezim pemerintahan Qadhafi berhasil diruntuhkan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan mengupayakan demokratisasi di Libya yang mengalami gejolak konflik luar biasa ini menjadi kajian politik dunia yang menarik untuk dianalisis. Penelitian skripsi ini akan menganalisis kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat menggunakan landasan konseptual Realisme Demokratik, peranan dan pengaruhnya terhadap demokratisasi di Libya, apakah kebijakan tersebut mampu membantu mewujudkan demokrasi dan mencapai tujuan Amerika Serikat di Libya.

1.5. Cakupan Penelitian

Fokus skripsi ini adalah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap demokratisasi di Libya pada tahun 2008-2016, yaitu pada saat pemerintahan Presiden Barack Obama yang mana puncak dari revolusi Libya terjadi pada rentang tahun tersebut. Selain itu, alasan lain penulis mengambil dan membatasi penelitian pada tahun 2008-2016 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama karena pergantian pemerintahan dari Presiden George W. Bush ke pemerintahan Presiden Barack Obama sangat menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa terpilihnya Presiden Barack Obama membawa perubahan arah kebijakan politik luar negeri Amerika yang bersifat *smart power* dibandingkan dengan kebijakan Presiden Bush sebelumnya yang lebih bersifat *hard power*, yaitu lebih ofensif dan begitu agresif terutama terhadap negara-negara Islam yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Zaki, 2011, hal. 8-9). Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama (2008-2016) terhadap proses demokratisasi di Libya.

1.6. Landasan Konseptual

Realisme Demokratik

Landasan konseptual yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan kebijakan luar negeri Realisme Demokratik. Pendekatan tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang cendekiawan politik konservatif terkenal Amerika Serikat, Charles Krauthammer, pada tahun 2004 di *American Enterprise Institute*. Pandangan mengenai pendekatan kebijakan

Realisme Demokratik tersebut, berangkat dari empat jenis pendekatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang telah diterapkan sebelumnya, yaitu Isolasionisme, Liberal Internasionalisme, Realisme, dan Globalisme Demokratik (Krauthammer, 2004, hal. 15).

Namun, dengan melihat kondisi dunia pasca Perang Dingin yang unipolar saat ini, menurut Krauthammer keempat pendekatan tersebut tidak cocok lagi digunakan oleh Amerika Serikat dalam kebijakan politik luar negerinya. Oleh karena itu, Krauthammer menawarkan alternatif, yaitu Realisme Demokratik sebagai pendekatan yang tepat bagi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat saat ini. Menurut Krauthammer Realisme Demokratik adalah pendekatan kebijakan politik luar negeri yang paling sesuai dengan posisi Amerika Serikat yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di dunia.

Krauthammer mendefinisikan Realisme Demokratik itu dalam ungkapan "*where it counts*" (Krauthammer, 2004, hal. 16). Maksudnya adalah keterlibatan Amerika Serikat tidak di seluruh wilayah di dunia, namun hanya pada negara-negara tertentu, terutama di wilayah di mana terdapat kepentingan nasional bagi negaranya. Krauthammer menyatakan bahwa, Realisme Demokratik adalah strategi yang mengkombinasikan penggunaan kekuatan militer dan agenda promosi demokrasi secara bersamaan, untuk menciptakan stabilitas yang akan menjamin dan mempermudah pencapaian kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat mendukung demokrasi di semua lokasi di dunia, tetapi hanya akan melakukan intervensi, apabila dapat memberikan dampak yang efektif dan signifikan bagi kepentingan Amerika

Serikat (Krauthammer, 2004, hal. 16-19). Terdapat empat poin penting dalam pendekatan Realisme Demokratik ini, yaitu peluang, wilayah yang memiliki nilai strategis atau terdapat kepentingan nasional. penggunaan kekuatan militer, dan penegakkan demokrasi.

Pada skripsi ini, kasus mengenai kebijakan Amerika Serikat di Libya akan dianalisis dengan konsep pendekatan Realisme Demokratik. Realisme Demokratik akan digunakan untuk melihat bagaimana Amerika Serikat dalam melihat peluang untuk intervensi di Libya, bagaimana Amerika Serikat menerapkan kebijakan politik luar negerinya di Libya dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Di mana, Libya merupakan salah satu negara yang diperhitungkan dan menjadi target penting bagi Amerika Serikat untuk menyebarkan paham demokrasi di kawasan Afrika Utara. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Libya nampaknya tidak bisa dilihat hanya sekedar alasan kemanusiaan, tetapi terdapat tujuan lain yang ingin dicapai di wilayah tersebut.

Sehingga melalui landasan konseptual Realisme Demokratik, skripsi ini akan menganalisis perwujudan prinsip-prinsip pendekatan Realisme Demokratik terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam keterlibatannya di Libya.

1.7. Tinjauan Pustaka

Krisis politik yang terjadi di Libya akibat kepemimpinan diktator Muammar Qhadafi mengundang sorotan dunia internasional. Jatuhnya kepemimpinan Qhadafi pada tahun 2011 menjadi sejarah baru bagi Libya untuk memulai membangun negaranya kembali. Dimana pembentukan

transisi pemerintahan Libya pasca revolusi ini tidak luput dari peran Amerika Serikat dalam mengintervensi proses *recovery* pemerintahan Libya. Dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan mencoba mengambil berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama terhadap proses demokratisasi di Libya, yaitu kebijakan militer, ekonomi dan politik sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

1.7.1. Kebijakan Militer Amerika Serikat di Libya

Ada beberapa akademisi yang telah menulis dan menganalisa sesuai dengan pandangannya masing-masing mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Libya. Keputusan pemerintah Obama untuk campur tangan secara militer di Libya adalah sebuah langkah penting yang bahkan menjadi perdebatan. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini berawal dari dikeluarkannya resolusi PBB Nomor 1973 yang memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris untuk membombardir Libya. Hal ini mengakibatkan keterlibatan Amerika Serikat di Libya menghentikan krisis pemerintahan yang terjadi semakin besar (Jeremiah Gertler, 2011, hal. 2-4).

Dalam tulisan Shawn Fitzgerald yang berjudul “*Military Intervention in Libya: Humanitarian Assistance Or Inevitable Regime Change?*” bahwa resolusi PBB nomor 1973 merupakan kesempatan Amerika Serikat membangun legalitas untuk membentuk sebuah koalisi internasional dan merancang strategi intervensi yang berlandaskan atas

bantuan kemanusiaan. Dalam kasus Libya, Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam dengan penggunaan kekuatan militer sehingga berusaha membangun legitimasi terlebih dahulu agar Amerika Serikat tidak begitu terlihat langsung ikut campur seperti dalam kasus Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat kemudian membangun legitimasi melalui Liga Arab dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Fitzgerald, 2011, hal. 1-24).

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam laporan *Humanitarian Policy Group* (HPG) bahwa resolusi PBB nomor 1973 juga memberikan otoritas kepada NATO untuk menerapkan zona larang terbang dan mengambil alih kendali untuk aksi militer internasional serta semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil dari serangan termasuk sebagai fasilitator pengiriman bantuan kemanusiaan (Humanitarian Policy Group, 2011, hal. 1-2). Kemudian, dalam jurnal yang berjudul "*NATO's 2011 Intervention in Libya: Beyond Humanitarian Intervention*" karya Chilaka Francis, Akor Ikechukwu dan Ugwu Anthony menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan Amerika Serikat untuk ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya. Dalam pelaksanaan kebijakan intervensinya, Amerika Serikat menggunakan instrument militernya yang bekerjasama dengan NATO dan mendukung tentara oposisi pemerintah Libya, yaitu *National Transition Council* (NTC) sebagai dewan pemerintah tandingan pemerintahan Qadhafi. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi bukanlah hanya sekedar

mengatasnamakan penegakan HAM dan kemanusiaan namun ada tujuan tersembunyi untuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Libya atas penggulingan rezim Qadhafi (Chilaka Francis Chigozie, 2013, hal. 5-10).

Tulisan lain yang menjelaskan mengenai intervensi Amerika Serikat di Libya dengan bantuan NATO adalah buku karya Yon Machmudi, Riyan Hidayat, dan Elia Agustina yang berjudul “*Sejarah Timur Tengah Kontemporer: Kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya*”. Buku ini menjelaskan bagaimana gejolak perpolitikan Timur Tengah dan Libya dalam proses menuju demokratisasinya dan keterlibatan asing dalam konflik-konflik yang terjadi. Keterlibatan dan peran Amerika Serikat melalui NATO dalam konflik Libya sangat terlihat jelas dimana NATO menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya dalam menanamkan pengaruhnya di Libya. Pemerintahan Qadhafi yang selama ini tidak pro terhadap Barat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Libya dalam proses *recovery* pemerintahan negaranya (Yon Machmudi, 2016, hal. 154-159).

1.7.2. Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat di Libya

Upaya Amerika Serikat dalam menegakkan demokrasi di Libya tidak hanya dilakukan dengan menggunakan strategi kekuatan militer tetapi perlu juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih lembut. Tulisan selanjutnya yang akan menjadi materi pendukung dalam penelitian ini adalah buku “*The Next Chapter: President*

Obama's Second-Term Foreign Policy” yang diedit oleh Xenia Dormandy. Dalam salah satu bab di buku tersebut, Steve Clemons menjelaskan mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang ke dua di Timur Tengah dan Afrika Utara. Peristiwa Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara akan menjadi peluang bagi Amerika Serikat untuk mendukung reformasi politik dan ekonomi menjadi lebih terbuka sehingga kepentingan Amerika Serikat dapat bertahan di kawasan tersebut (Clemons, 2013, hal. 41-44).

Steve menjelaskan bahwa Amerika Serikat perlu menggunakan kemampuan *soft power* untuk mendukung upaya reformasi demokrasi dan mengurangi keterlibatan militer. Keberhasilan intervensi militer di Libya pada periode sebelumnya membuat Amerika Serikat harus merancang strategi kebijakan selanjutnya agar hubungan dan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut tetap baik. Dukungan ekonomi untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara akan menjadi fokus perencanaan strategi kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut pada periode kedua masa pemerintan Presiden Barack Obama. Amerika Serikat dan sekutunya harus bekerja sama untuk membantu meningkatkan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan melalui investasi di kawasan tersebut (Clemons, 2013, hal. 42-46).

Selanjutnya pada tulisan Christopher M. Blanchard yang berjudul “*Libya: Transition and U.S. Policy*” menyatakan bahwa transisi politik Libya telah terganggu oleh kelompok-kelompok non-negara bersenjata dan mengancam dengan keraguan dan pertikaian para pemimpin interim. Dalam tulisan ini juga dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan PBB dan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan keamanan dan bantuan untuk menyelesaikan proses transisi Libya, seperti perjanjian *Government of National Accord* (GNA) untuk mengawasi penyelesaian transisi dan adanya resolusi PBB 2174. Resolusi tersebut menjelaskan mengenai otorisasi penempatan sanksi keuangan dan perjalanan pada individu dan entitas yang ditemukan "terlibat dalam atau memberikan dukungan untuk tindakan-tindakan lain yang mengancam perdamaian, stabilitas atau keamanan Libya, atau menghalangi atau melemahkan keberhasilan penyelesaian transisi politik (Blanchard, 2016, hal. 1-9).

Hal serupa terkait kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat baik dalam hal bantuan ekonomi dan kemanusiaan diungkapkan juga oleh James Phillips dalam tulisan yang berjudul “*U.S. Aid to Egypt and Libya: Tight Strings Needed*” menjelaskan bahwa selama kerjasama Amerika Serikat dan Libya dalam memerangi terorisme terus berjalan maka bantuan untuk Libya akan terus digelontorkan. Bahkan pada tahun 2011 saat terjadinya pemberontakan, Amerika Serikat masih menyediakan dana bantuan sekitar 200 juta USD ke Libya, termasuk bantuan kemanusiaan senilai 89 juta USD, pengurangan senjata sebesar

40 juta USD, dan 25 juta USD bantuan senjata non-lethal untuk Departemen Pertahanan dan di tahun 2012 Amerika Serikat memproyeksikan kebijakan fiscal sekitar 13 juta USD untuk bantuan luar negeri ke Libya (Phillips, 2012, hal. 1-2).

Lebih lanjut, materi yang akan menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Muoneke, Chukwuemeka. V dengan judul *The Role Of The United State's Government In Regime Change And Neoliberal Reforms In Libya*. Penelitian tersebut menjelaskan terkait hubungan antara bantuan Amerika Serikat dan upayanya dalam mendukung transisi Libya menjadi negara yang demokratis. Berbagai bantuan, seperti bantuan finansial, pembangunan ekonomi dan politik, keuangan dan logistik diberikan. Pemerintahan Presiden Obama menyediakan anggaran dana sekitar 16 juta USD untuk transisi demokrasi Libya yang digelontorkan melalui *Middle East Partnership Initiative* (MEPI). Melalui MEPI ini, Amerika Serikat secara tidak langsung juga memberikan bantuan teknis, seperti akademi pelatihan untuk calon kandidat, manajemen kampanye, membantu melatih dan menerapkan pemantau pemilihan yang terakreditasi untuk mendukung adanya pelaksanaan pemilu yang kompetitif, inklusif, multi partisan, kredibel dan transparan. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga membantu untuk membebaskan aset Libya yang dibekukan maupun diblokir (Muoneke, 2015, pp. 93-113).

Selanjutnya adalah buku Thomas Carothers yang berjudul *Democracy Policy Under Obama : Revitalization or Retreat?*. Buku ini menjelaskan mengenai kebijakan promosi demokrasi pada masa pemerintahan Barack Obama. Di awal masa pemerintahannya, Obama terus mencoba melakukan pendekatan kepada negara-negara non demokrasi dengan meningkatkan keterlibatan multilateral untuk mendukung secara normatif kerangka kelembagaan yang demokratis. Kemudian pada tahun 2011, ketika terjadi *Arab Spring* Amerika Serikat semakin meningkatkan intensitas perhatiannya terhadap strategi kebijakan demokrasinya karena menganggap fenomena *Arab Spring* membahayakan berbagai kepentingan ekonomi dan keamanan Amerika. Salah satu yang menjadi tantangan dan fokus utama Amerika Serikat adalah Libya (Carothers, 2012, pp. 32-35).

Obama memutuskan untuk intervensi ketika setelah keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973, yang memberi wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk melindungi warga sipil Libya. Dalam intervensinya selain bekerjasama dengan NATO, Amerika Serikat juga memberikan dukungan diplomatik dan teknis kepada NTC dengan harapan dapat membantu konsolidasi pembangunan sistem pemerintahan demokrasi termasuk pembangunan masyarakat sipil, pemilu yang bebas dan adil, penguatan partai politik, pengembangan media, peraturan hukum, pendidikan kewarganegaraan, aktivisme hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang adil, efektif, transparan,

serta memperkuat norma dan institusi yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (Carothers, 2012, hal. 34-40).

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka di atas, analisis dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan sebelumnya yang belum membahas masalah penerapan Realisme Demokratik oleh Amerika Serikat dalam mewujudkan demokrasi di Libya. Pada penelitian ini, penulis akan fokus menganalisis kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat masa pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2008-2016 dalam keterlibatannya pada revolusi Libya dengan menggunakan landasan konsep Realisme Demokratik. Kemudian melihat bagaimana peranan dan pengaruh kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap *recovery* pembentukan pemerintahan dalam proses demokratisasi di Libya.

1.8. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Di mana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus dengan menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 2002, hal. 3).

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif ini. Pertama, karena dalam penelitian ini penulis ingin menghasilkan satu pemahaman mengenai bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap munculnya fenomena revolusi Libya. Kedua, penulis ingin membangun argumentasi kausal terkait bagaimana kekuatan Amerika Serikat berpengaruh dan memiliki peranan dalam *recovery* di Libya yang diimplementasikan melalui strategi luar negerinya.

Terakhir, mengingat pembahasan mengenai kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah hal yang memerlukan analisis deskriptif yang lebih luas dan mendalam sehingga penulis memilih metode kualitatif. Melalui analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan fakta, kemudian data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis sesuai kerangka konsep sehingga nantinya dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini :

1.8.1. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan data akan diperoleh melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2006, hal. 225). Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain di mana diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini untuk memperoleh data penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan pemerintah, buku-buku, surat kabar, jurnal, laporan, media massa maupun internet seperti web pemerintahan resmi, berita-berita yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Melalui studi kepustakaan dan dokumen penulis ingin menemukan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan penelitian, diantaranya adalah :

1. Melihat gambaran secara komprehensif mengenai isu konflik di Libya sebelum revolusi dan setelah revolusi, khususnya ketika Amerika Serikat menjadikan Libya sebagai salah satu fokus kebijakan politik luar negerinya di daerah Afrika Utara.
2. Melihat dampak akibat revolusi Libya yang terjadi setelah penggulingan Muammar Qadhafi dan proses demokratisasi di Libya dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.
3. Melihat pengaruh kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap dinamika demokratisasi di Libya.

1.8.2. Metode Analisis Data

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, tahapan selanjutnya adalah proses analisa data. Analisa data merupakan sebuah proses dalam mengatur urutan data, kemudian mengorganisasikan data yang diperoleh, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan hal yang penting, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada pembaca (Moleong, 2002, hal. 103). Dalam penelitian ini, pemaparan yang jelas dan rinci sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Libya sebelum, pada saat, dan pasca revolusi.

Kemudian, penelitian ini akan melihat bagaimana peranan serta pengaruh Amerika Serikat dalam proses demokratisasi di Libya. Sehingga lebih lanjut, penelitian ini dapat menganalisis kepentingan nasional Amerika Serikat serta bagaimana pencapaian kepentingan nasionalnya di Libya dengan menggunakan landasan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Realisme Demokratik.